

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Banggai Anak serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan

prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten banggai di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amiin.

Luwuk, 2020

Kepala Dinas

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19641126 199303 2 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi - misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

LKjIP DP2KB-P3A Tahun 2019 ini untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2019 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Banggai 2016 - 2021 adalah **Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya**". Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2019 DP2KBP3A Kabupaten Banggai melaksanakan 16 program dengan 42 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.520.640.000,-**. Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 2 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan

Program dan Kegiatan dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi Hasil), DID (Dana Insentif Daerah) Tahun 2019 berjumlah **Rp. 10.520.640.000,-**. terealisasi **Rp. 10.040.101.823** dengan realisasi fisik 95,69% dan realisasi keuangan 95,43%.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Banggai, perlu meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan program perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja DP2KBP3A lebih baik dan akuntabel yaitu melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian kinerja Organisasi .....	16
B. Realisasi anggaran .....	31
BAB IV PENUTUP .....	33
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Anggaran.....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Anggaran.....	13
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama .....	18
Tabel 3.2	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	19
Tabel 3.3	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	20
Tabel 3.4	Data Program KKBPK.....	20
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir (Sebelum Perubahan) .....	20
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir (Sesudah Perubahan) .....	21
Tabel 3.7	Realisasi Pencapaian Target Perubahan RPJMD Tahun 2019 .....	22
Tabel 3.8	Persentase Kinerja Tahun 2019 VS Target Nasional .....	23
Tabel 3.9	Rekapitulasi Realisasi Anggaran DP2KBP3A.....	31
Tabel 3.10	Realisasi Program dan Kegiatan (IKU).....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator

Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A)
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A) pada tahun berikutnya.

#### ❖ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai.

#### **A. Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai



tugas pokok yakni melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah meliputi urusan wajib bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **B. Fungsi**

Adapun fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan dan pelayanan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DP2KBP3A, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

Sekretariat terdiri dari :

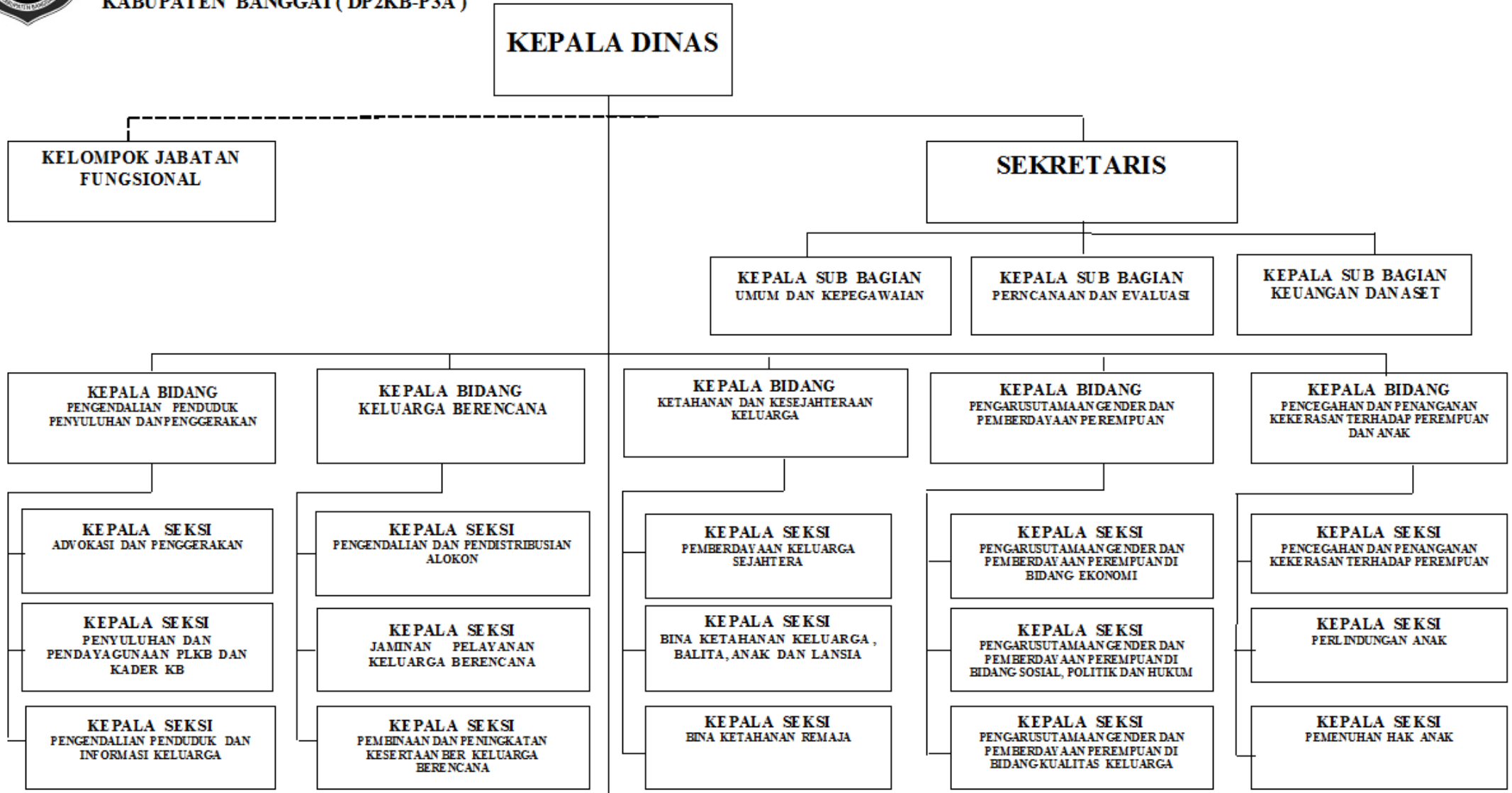
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
    - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan
    - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB
    - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  4. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
    - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB
- 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga
    - a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
    - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja
- 6. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi
  - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial
  - c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga
- 7. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
  - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
  - b. Seksi Perlindungan Anak
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANGGAI ( DP2KB-P3A )**



Adapun DP2KBP3A Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keseluruhannya berjumlah : 62 orang

**a. Berdasarkan Jabatan / Struktural**

- 1) Tenaga Eselon II : 1 Orang
- 2) Tenaga Eselon III : 6 Orang
- 3) Tenaga Eselon IV : 18 Orang
- 4) Tenaga Non Eselon : 37 Orang

**b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

- 1) S2 (Strata 2) : 6 Orang
- 2) S1 (Strata 1) : 37 Orang
- 3) D3 (Diploma 3) : 2 Orang
- 4) SMU/SMA : 17 Orang

**B. Fungsi Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Aspek-aspek Strategis DP2KBP3A Kabupaten Banggai diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A, yaitu :

1. Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan / P2TP2A

### **C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi**

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Belum optimalnya kelembagaan P2TP2A dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak
- c. Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi seperti: pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- d. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti: pornografi dan pelecehan seksual
- e. Penyetaraan gender dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial belum merata
- f. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
- g. Meningkatnya kasus-kasus TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza)
- h. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
- i. Masih adanya efek samping dan komplikasi alat/obat kontrasepsi KB
- j. Pelayanan KB di klinik KB yang masih perlu ditingkatkan
- k. Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Organisasi**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021 dibuat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021.

Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 2016-2021 sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Periode 2016 - 2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**, dimana upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi tersebut tentunya juga ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan prima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

## 2. Misi

Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya mencapai visi yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Banggai, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Banggai, termaktub dalam misi pertama yakni ***Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa*** dan misi ke enam ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Daerah.***

## 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai sehingga rumusannya

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

DP2KB-P3A Kabupaten Banggai mengharapkan segala permasalahan yang dihadapi dapat segera terpecahkan dan teratasi dengan baik sehingga pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencanabener-bener dapat tercapai sesuai dengan rencana artinya pembangunan tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Banggai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam periode 5 tahun kedepan yakni :

- a. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak.

#### **4. Sasaran**

DP2KB-P3A Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diarahkan untuk memperoleh hasil / capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni :

- a. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak.

#### **5. Strategi dan Kebijakan**

Strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan Kualitas Kinerja dan tata kelola.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DP2KBP3A.
- c. Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penelitian dan pengembangan daerah.
- d. Peningkatan kompetensi profesionalitas, dan disiplin ASN serta budaya kerja Melakukan Rapat-rapat dengan instansi terkait dengan Instansi terkait dan Mitra Kerja DP2KB-P3A.
- e. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan KesetaraanGender.



- f. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak serta melakukan kerjasama lintas sektor dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kecamatan layak anak.
- h. Meningkatkan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out dan penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB.
- i. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
- j. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.

Kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan DP2KBP3A Kabupaten Banggai melalui :

- a. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis goverment.
- b. Peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- c. Penyediaan data yang valid dan reliable untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

- d. Penegakan disiplin ASN melalui penerapan reward dan punishment.
- e. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.
- f. Peningkatan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- g. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
- h. Peningkatan pelayanan keluarga berencana.
- i. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja.
- j. Peningkatan keluarga sejahtera

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana berikut :

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- b. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih
- c. Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2019 menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai tahun 2019. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai tahun 2019 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai tahun 2019 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). DP2KBP3A Kabupaten Banggai telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut :

#### 1) Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Anggaran

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Persentase Pengendalian Angka Kelahiran	1.49 %
		Jumlah Rata-rata anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (TFR)	3.02 %
2	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91%

2) Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Anggaran

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,95
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	100
		Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	2,75

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,475.819.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 249.910.000
3	Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Rp 7.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 15.000.000
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 48.000.000
6	Pengembangan Sistem Informasi / Data	Rp 20.000.000
7	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp 204.272.692
8	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 103.000.000
9	Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak	Rp 11.676.500
10	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Rp 47.000.000
11	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp 85.000.000
12	Keluarga Berencana	Rp 5.891.790.000

13	Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	28.772.500
14	Pelayanan Kontrasepsi	Rp	50.000.000
15	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp	85,000,000
16	Keluarga Sejahtera	Rp	151.801.000
	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>10.520.640.000</b>

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut sebesar **Rp. 10.520.640.000,-** yang akan digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan di Tahun 2019.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja DP2KBP3A dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realiasi kinerja tahun ini. Target yang dimaksud adalah Rencana Kinerja tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana maupun sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya.

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam kaitan dengan Sasaran Strategis ini, terdapat 3 indikator Kinerja Utama (IKU) DP2KB-P3A sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- b. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih
- c. Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG adalah indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan partisipasi untuk mengukur ketimpangan. = $\frac{1}{3} (Ipar + IDM + linc-dist)$ Ket : Ipar = indeks keterwakilan diparlemen IDM = indeks pengambilan keputusan linc-dist = indeks distribusi pendapatan	Bidang PUG dan PP
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	= $\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan perlindungan / pendampingan oleh petugas terlatih}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor}} \times 100$	Bidang PA
		Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	TFR adalah banyaknya anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (usia 15-49) selama masa reproduksi. = $\frac{\text{Jumlah anak yang dilahirkan oleh WUS}}{\text{Jumlah WUS}} \times 1000$	Bidang KB, DALDUK dan KS

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana maupun sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya.



Untuk dapat menganalisa hasil capaian kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai selama Tahun 2019, berikut disajikan data Analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### 1. Target capaian kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2019

Dari penetapan Target Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai Tahun 2019 sesuai target renstra dapat memenuhi capaian yang diharapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ;

**Tabel 3.2**  
**Target capaian kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76.95	40.96
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	100	100
		Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	2.75	3

### 2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa tahun Terakhir

Peningkatan Realisasi capaian Kinerja DP2KBP3A tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	KDRT	2 Kasus	6 Kasus	9 Kasus
2	Pencabulan	19 Kasus	21 Kasus	11 Kasus
3	Anak berhadapan dengan hukum	1 Kasus	0	2 Kasus
4	Penganiayaan terhadap anak	6 Kasus	5 Kasus	10 Kasus

**Tabel 3.4**  
**Data Program KKBPK**

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pasangan Usia Subur	68,367	69,134	68,882
2	Peserta KB Aktif	54,057	54,341	54,405
3	Peserta KB Baru	5,451	4,834	4,316

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa tahun Terakhir (Sebelum Perubahan)**

No	Indikator kinerja utama	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91	91,5	-	-	-	-
2	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,25	1,82	-	-	-	-
3	Jumlah Rata-rata Anak yang dimiliki oleh WUS selama masa reproduksi (TFR)	3.02	2.80	3	100	100	2,75

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan**  
**Tahun 2018 dan beberapa tahun Terakhir**  
**(Sesudah Perubahan)**

No	Indikator kinerja utama	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	40,96	-	-	53,23
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	-	-	100	-	-	100
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	3.02	2.80	3	100	100	91,67

Pada tahun 2019 terdapat perubahan indikator kinerja utama pada pembahasan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### 3. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target RPJMD

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD (Tahun 2016-2021), DP2KBP3A Kabupaten Banggai mempunyai peran untuk melaksanakan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016 -2021 yaitu:

**Misi ke I : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa**, sebagaimana *Tujuan ke –*

*1* pada RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. dengan *Sasaran ke 1* Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai dengan Indikator Kinerja dengan upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan disiplin ASN dan sinkronisasi dokumen perencanaan.

**Misi ke VI : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah,** sebagaimana *Tujuan ke – 6* pada RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan *Sasaran ke 1* Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Banggai dengan Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih dan Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR), DP2KBP3A Kabupaten Banggai sampai dengan Tahun 2019 telah merealisasikan pencapaian Target yang Signifikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.7**  
**Realisasi Pencapaian Target Perubahan RPJMD Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Indikator kinerja utama</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	40,96	Target Tidak Terdapat di RPJMD
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	87,51	100	114%
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	2	3	150%

#### **4. Realisasi Kinerja Tahun 2019 Vs Target Nasional**

Adapun realisasi kinerja tahun 2019 DP2KBP3A dengan target nasional Kementerian PPPA dan BKKBN Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 3.8**  
**Persentase Kinerja Tahun 2019 VS Target Nasional Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Indikator kinerja utama</b>	<b>Target Nasional</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,10	40,96	Belum mencapai target
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	100	100	Sudah mencapai target
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	2,28	3	Belum mencapai target

**5. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi**

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2019 rata-rata pencapaian target kinerjanya dapat terealisasi dengan sangat baik. Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia di lapangan yang saat ini hanya terdiri dari 16 tenaga penyuluh KB PNS dan 14 PTT PLKB
- b. Tingginya Unmeetneed yaitu 8.950 wanita usia subur
- c. Masih adanya kasus KDRT yaitu 9 kasus
- d. Kurangnya sosialisasi kegiatan kepada masyarakat
- e. Kurangnya advokasi program dan kegiatan kepada pemangku kebijakan.

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengoptimalkan kader desa yang ada
2. Melakukan peningkatan pelayanan KB melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan KB MKJP
3. Penyebarluasan informasi melalui media masa dan elektronik tentang program KKBPK
4. Penyebarluasan informasi produk undang-undang perlindungan perempuan dan anak kepada sekolah dan masyarakat
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kebijakan
6. Pendekatan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

## **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk mencapai tujuan sasaran strategis dan RPJMD diperlukan dukungan sumberdaya terutama dukungan anggaran. Anggaran yang telah disetujui akan digunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan penggunaan sumberdaya anggaran ini akan diketahui apakah capaian sasaran dan RPJMD itu dilaksanakan secara efisien atau tidak.

## **7. Analisis program / kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

### **a. Program Keluarga Berencana**

Pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan 3 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 7.761.795.411 dengan realisasi Rp. 5.555.890.532 menunjukkan proporsi pencapaian

keuangan sebesar 90.90 % dan target kinerja Fisik 90.90 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

❖ **Pelayanan KIE**

Kegiatan Pelayanan KIE dengan anggaran sebesar Rp. 364.690.000 dan realisasi Rp. 353.013.660 atau 96,80 % , rincian kegiatan melakukan pemutaran film di 6 Kecamatan yang dirangkaikan dengan advokasi dan penyuluhan, iklan koran dan iklan radio serta cetak media KIE.

❖ **Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon**

Kegiatan Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon dengan anggaran sebesar Rp. 7.896.239 atau realisasi keuangan 100 %, kegiatan ini dilakukan pencatatan, pelaporan stock opname alkon di gudang obat untuk mengetahui persediaan alat dan obat kontrasepsi yang akan disalurkan untuk klinik KB.

❖ **Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/ KS**

Kegiatan Sarana dan Prasarana KB/ KS dengan anggaran sebesar Rp. 5.522.100.000 dan realisasi sebesar Rp. 5.436.806.910 atau realisasi 92.28 %, kegiatan ini terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik (BOKB), dengan rincian DAK Fisik berupa pengadaan Implant KIT, IUD KIT, KIE KIT, GENRE KIT dan sarana pelengkap sarana penyuluhan ( Pembuatan Pagar ) untuk menunjang kinerja petugas dilapangan.

Untuk Non fisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) di lapangan dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KBserta terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung KB. Dampak yang akan dihasilkan menurunnya Total Fertiliti Rate (TFR).

**b. Program Kesehatan Reproduksi remaja**

Pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 28.772.500, dengan realisasi Rp. 42.540.500 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.96 % dan target kinerja Fisik 99.96 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

#### ❖ **Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR**

Kegiatan Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR dengan anggaran sebesar Rp. 28.772.500,- dan realisasi sebesar Rp. 28.772.500 atau realisasi 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tenaga pengelola PIK KRR dengan tujuan diskusi mengenai masalah – masalah dan solusi yang berkaitan dengan remaja yang ada di sekolah maupun di masyarakat, dan melakukan sosialisasi untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengelola PIK di sekolah.

#### **c. Program Pelayanan Kontrasepsi**

Pelaksanaan program Pelayanan dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000, dengan realisasi Rp. 49.166.500 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98.33 % dan target kinerja Fisik 98.33 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

#### ❖ **Pelayanan TKBK Kabupaten - Kecamatan**

Kegiatan Pelayanan TKBK Kabupaten – Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.166.500 atau realisasi 91.70 %, realisasi fisik 91.70 %, Kegiatan Pelayanan TKBK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penancangan KB – Kes PKK dan KB – Kes TNI dan pelayanan TKBK di 12 kecamatan yang bertujuan meningkatkan akses layanan keluarga berencana sasaran bagi PUS yang ingin ber KB dengan hasil yang diperoleh meningkatnya cakupan kesetaraan KB. Adapun manfaat yang dihasilkan bagi PUS mengatur jarak kelahiran sehingga kesehatan reproduksi peserta KB dapat terjaga sehinggadampak yang ditimbulkan menurunnya Total Fertiliti Rate (TFR).

#### **d. Program Keluarga Sejahtera**

Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 151.801.000, dengan realisasi Rp. 150.676.500 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.26 % dan target kinerja Fisik 99.26 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



❖ **Pelaksanaan HARGANAS**

Kegiatan Pelayanan HARGANAS dengan anggaran sebesar Rp. 39.801.000,- dan realisasi sebesar Rp. 39.801.000 atau realisasi 100 %, realisasi fisik 100 %, Kegiatan Pelaksanaan HARGANAS dilaksanakan dalam bentuk ceremonial di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan Cipta Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, Manggala Karya Kencana dan Penghargaan keluarga nasional yang memenuhi kriteria 8 fungsi keluarga.

❖ **Bimtek dan Pemilihan Kader/ Kelompok TriBina (BKB, BKR, BKL)**

Kegiatan Bimtek dan Pemilihan Kader/Kelompok (BKB, BKR, BKL) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.918.500 atau realisasi 99.59 %, Kegiatan Pelaksanaan Bimtek dan Pemilihan Kader/ Kelompok (BKB, BKR, BKL) dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kepada sebagai pemantapan dan sosialisasi Tri Bina dan pemilihan kader teladan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja.

❖ **Pelatihan/ Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan IMP**

Kegiatan Pelatihan/ Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan IMP dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.458.500 atau realisasi 98.45 %, kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada PLKB dan Kader dan untuk memotivasi PLKB agar lebih maksimal dalam kegiatan serta memonitoring PLKB.

❖ **Pelaksanaan kelompok UPPKS**

Kegiatan Pelaksanaan kelompok UPPKS dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.918.500 atau realisasi 98.45 %, kegiatan kelompok UPPKS dilaksanakan dalam bentuk pembinaan Kelompok UPPKS di Kabupaten Banggai. Hasil yang diperoleh terbinaanya anggota kelompok UPPKS dibidang usaha. Adapun manfaat yang diperoleh meningkatnya pendapatankeluarga kelompok UPPKS melalui usaha pembuatan produk makanan yang dikelola dan dikemas dengan benar dengan dampak meningkatnya pendapatan keluarga dan Pra KS1, KS2, KS3.

❖ **Penyajian Data dan Informasi Pembangunan Keluarga**

Kegiatan Penyajian data dan Informasi pembangunan keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 39.999.000 atau realisasi 100 %, kegiatan dilaksanakan bertujuan menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan keluarga melalui pendataan keluarga.

**e. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**

Pelaksanaan program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dengan 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000, dengan realisasi Rp. 84.198.000 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.06 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

❖ **Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB**

Kegiatan Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.000.000 atau realisasi 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di desa terpencil untuk mengenalkan program KKBPK.

❖ **Peran Serta Lintas Sektor untuk Menggerakkan Masyarakat dalam Pelayanan KB**

Kegiatan Peran serta lintas sector untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 59.198.000 atau realisasi 98.66 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ceremonial lintas sektor yang dirangkaian dengan kegiatan pelayanan KB.

**f. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Pelaksanaan program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 79.045.468, dengan realisasi Rp 78.991.350,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.92 % dan target kinerja Fisik 100 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

❖ **Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 20.069.009,- dan realisasi sebesar Rp. 20.045.450,- atau realisasi 99.88 % dan realisasi fisik 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tujuan memperkuat komitmen yang sudah ada dengan para pembuat komitmen untuk meningkatkan strategi PUG dalam melaksanakan PPRG.

❖ **Fasilitasi Pembentukan/ Pembinaan Kota Layak Anak dan Forum Anak daerah**

Kegiatan Pembentukan/pembinaan kota layak anak dan forum anak daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.746.200,- atau realisasi 98.28 %, kegiatan bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/ kota yang mengarah pada upaya transformasi hak – hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak – hak anak pada suatu kabupaten dengan menciptakan kota ramah anak contohnya menyediakan tempat bermain anak di fasilitas umum, dan lain – lain dan kegiatan ceremonial untuk memperingati Hari Anak Nasional.

**g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 11.676.500, dengan realisasi Rp. 11.676.500,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 100 %, kegiatannya adalah :

❖ **Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan PUG dan PP**

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan PUG dan PP dengan anggaran sebesar Rp. 11.676.500 dengan realisasi 100%, kegiatan yang dilaksanakan melalui kelompok kerja adalah yang muncul dari tuntutan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

#### **h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 47.000.000, dengan realisasi Rp. 43.642.000,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 92.86 % dengan kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, Sasaran kegiatan ini adalah kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di 23 Kecamatan Se-Kabupaten Banggai dengan manfaat yang diperoleh kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat terlayani dan tertangani dengan baik oleh Tim P2TP2. Sedangkan dampak dari kegiatan ini kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan dari Tim P2TP2A memiliki kualitas hidup yang semakin baik dan meningkat.

#### **i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

Pelaksanaan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 131.598.308, dengan realisasi Rp. 129.919.000,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98.72 % dengan rincian kegiatan :

##### **❖ Pembinaan POKJA dalam Pelaksanaan PPRG**

Kegiatan Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG dengan anggaran sebesar Rp. 19.940.500,- dan realisasi sebesar Rp. 19.940.500,- atau realisasi 100 %, kegiatan dilaksanakan supaya adanya dokumen realisasi kecapaian kinerja pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan, terlaksananya evaluasi percepatan evaluasi percepatan pelaksanaan PPRG.

##### **❖ Fasilitasi Perempuan dalam Pembangunan**

Fasilitasi Perempuan dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 111.657.808 dan realisasi sebesar Rp. 109.978.500 atau realisasi 98.50%, kegiatan ini dilaksanakan dengan dua sub kegiatan yang pertama kegiatan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (P2WKSS) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan sikap dan bidang sehingga kualitas kehidupan dalam berkeluarga dapat tercapai sebagaimana diharapkan dan Kegiatan Penyelenggaraan Hari Ibu yang dilakukan ceremonial untuk memperingati Hari Ibu.

#### D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 DP2KBP3A mendapat anggaran sebesar **Rp. 17.555.311.489,-** yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) : **Rp. 7.034.671.489** dan belanja Langsung (BL) : **Rp. 10.520.640.000**

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DP2KBP3A Kabupaten Banggai yang bersumber dari DAU, DAK, DID, DBH Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Rekapitulasi Realisasi Anggaran DP2KBP3A**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>7,034,671,489</b>	<b>6.398.730.016</b>	<b>91,00</b>
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>10,520,640,000</b>	<b>10.102.828.723</b>	<b>96,03</b>
	- Belanja Pegawai	2,745,000,000	2.745.000.000	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa	6,495,247,500	6.183.764.723	95,21
	- Belanja Modal	1,280,392,500	1.174.064.000	91,70
	<b>Total</b>	<b>17,555,311,489</b>	<b>16.501.558.739</b>	<b>94,00</b>

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DP2KBP3A tahun 2019 sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar **Rp. 6.500.638.308** dengan realisasi sebesar **Rp 6.035.458.810** atau **95,43%**. adapun rincian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Program dan Kegiatan**  
**(Indikator Kinerja Utama)**

No	Program / Kegiatan	Anggaran 2019 (Rp)		Persentase (%)	Sisa Anggaran
		Alokasi	Realisasi		
<b>A</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>5,891,790,000</b>	<b>5,436,806,910</b>	<b>92.28</b>	<b>454,983,090</b>
1	Pelayanan KIE	364,690,000	353,013,660	96.80	11,676,340
3	Monitoring, Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	5,000,000	5,000,000	100.00	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS	5,522,100,000	5,078,793,250	91.97	443,306,750
<b>B</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>103,000,000</b>	<b>100,600,900</b>	<b>97.67</b>	<b>2,399,100</b>
1	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	30,000,000	28,854,700	96.18	1,145,300
2	Fasilitasi Pembentukan/Pembinaan Kota Layak Anak dan Form Anak Daerah	73,000,000	71,746,200	98.28	1,253,800
<b>C</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>28,772,500</b>	<b>28,772,500</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
1	Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR	28,772,500	28,772,500	100.00	-
<b>D</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>11,676,500</b>	<b>11,676,500</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
1	Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan PUG dan PP	11,676,500	11,676,500	100.00	-
<b>E</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,166,500</b>	<b>98.33</b>	<b>833,500</b>
1	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	50,000,000	49,166,500	98.33	833,500
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>47,000,000</b>	<b>43,642,000</b>	<b>92.86</b>	<b>3,358,000</b>
1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	47,000,000	43,642,000	92.86	3,358,000
<b>G</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>	<b>85,000,000</b>	<b>84,198,000</b>	<b>99.06</b>	<b>802,000</b>
1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	25,000,000	25,000,000	100.00	-
2	Peran serta Lintas Sektor untuk Menggerakkan Masyarakat dalam Pelayanan KB	60,000,000	59,198,000	98.66	802,000
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>131,598,308</b>	<b>129,919,000</b>	<b>98.72</b>	<b>1,679,308</b>
1	Pembinaan POKJA dalam Pelaksanaan PPRG	19,940,500	19,940,500	100.00	-
2	Fasilitasi Perempuan dalam Pembangunan	111,657,808	109,978,500	98.50	1,679,308
<b>I</b>	<b>Program Keluarga Sejahtera</b>	<b>151,801,000</b>	<b>150,676,500</b>	<b>99.26</b>	<b>1,124,500</b>
1	Pelaksanaan HARGANAS	39,801,000	39,801,000	100.00	-
2	Pembinaan Kelompok UPPKS	20,000,000	19,499,500	97.50	500,500
3	Bintek dan Pemilihan Kader/Kelompok Tri Bina (BKB,BKR,BKL)	20,000,000	19,918,500	99.59	81,500
4	Pelatihan/Pertemuan PLKB,IMP dan Penilaian Lomba PKB dan IMP	35,000,000	34,458,500	98.45	541,500
5	Penyajian Data dan Informasi Pembangunan Keluarga	37,000,000	36,999,000	100.00	1,000
<b>Total</b>		<b>6,500,638,308</b>	<b>6,035,458,810</b>	<b>95.43</b>	<b>465,179,498</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai tahun anggaran 2019, sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat capaian sasaran, dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2019 menunjukkan tingkat rata – rata perolehan angka skala pengukuran 90% dengan kategori **Berhasil**.

#### **B. Langkah Di Masa Mendatang**

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020 maka langkah yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan Program KKBPK
2. Membentuk Kota Layak Anak
3. Membentuk Pelopor Cegah Nikah Dini



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANGGAI**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, 2019

Pihak Kedua,  
**BUPATI BANGGAI**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**  
**Nip. 19641002 199003 1 006**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BANGGAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	76,95
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	%	100
		Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	Anak Per WUS	2,75
2	Meningkatnya tata kelola Dinas P2KB-P3A yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	A
		Persentase peningkatan disiplin ASN	%	92

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,475.819.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 249.910.000
3 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Rp 7.000.000
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 15.000.000
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 48.000.000
6 Pengembangan Sistem Informasi / Data	Rp 20.000.000
7 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp 204.272.692
8 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 103.000.000
9 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak	Rp 11.676.500
10 Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Rp 47.000.000
11 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp 85.000.000
12 Keluarga Berencana	Rp 5.891.790.000
13 Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp 28.772.500

14	Pelayanan Kontrasepsi	Rp	50.000.000
15	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp	85,000,000
16	Keluarga Sejahtera	Rp	151.801.000
		<b>Total Rp</b>	<b>10.520.640.000</b>

Luwuk, 2019

Pihak Kedua,  
**BUPATI BANGGAI**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**  
**Nip. 19641002 199003 1 006**